

POTENSI INFLASI PASCAPENYESUAIAN HARGA BBM DAN KENAIKAN SUKU BUNGA ACUAN BI

19

Edmira Rivani

Abstrak

Kenaikan suku bunga acuan BI dan kenaikan harga BBM yang terjadi akhir-akhir ini dapat berdampak pada perekonomian dan memukul daya beli masyarakat. Tulisan ini bertujuan mengkaji potensi kenaikan inflasi akibat penyesuaian harga BBM, dan kenaikan suku bunga acuan BI dalam memitigasi kenaikan harga BBM. Efek kenaikan inflasi terhadap daya beli bisa diminimalisasi jika pemerintah menyediakan tambahan bantuan sosial untuk masyarakat rentan. Sementara efek kenaikan suku bunga acuan terhadap perekonomian kemungkinan dampaknya baru akan terasa enam hingga sembilan bulan ke depan. Namun, kenaikan suku bunga acuan BI juga merupakan langkah pre-emptive dan forward looking untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi akibat kenaikan harga BBM dan inflasi volatile food. Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah harus cermat dan berupaya ekstra untuk terus menurunkan inflasi dalam rentang maksimal 5%. DPR RI khususnya Komisi XI dan IV perlu melakukan pengawasan dalam hal pengendalian inflasi di tengah masyarakat, khususnya sektor pangan.

Pendahuluan

Perekonomian Indonesia menghadapi dua tantangan berat akhir-akhir ini, yaitu kenaikan suku bunga acuan BI dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan nonsubsidi. Hal ini dapat berdampak pada perekonomian dan memukul daya beli masyarakat. Berdasarkan pengumuman resmi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), harga BBM jenis RON 90 atau pertalite naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, solar naik dari Rp5.150 per liter ke Rp6.800 per liter, serta pertamax nonsubsidi juga naik dari

Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter (tempo.co, 4 September 2022).

Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk mendukung rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Pemerintah ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Namun, keinginan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Sebab, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun. Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat terus. Hal lainnya adalah lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh golongan masyarakat



yang mampu, yaitu pemilik mobil pribadi (menpan.go.id, 5 September 2022).

Wacana kenaikan harga BBM berisiko menaikkan inflasi dari level yang saat ini juga mencapai rekor tertingginya dalam hampir tujuh tahun. Tekanan inflasi yang tinggi bisa mendorong makin banyak masyarakat yang jatuh miskin. Sebagaimana diketahui, kenaikan harga BBM akan berdampak terhadap tingkat indeks harga konsumen (IHK) hingga roda perekonomian nasional. Tulisan ini akan membahas mengenai potensi kenaikan inflasi akibat penyesuaian harga BBM, dan kenaikan suku bunga acuan BI dalam memitigasi kenaikan harga BBM.

Dampak terhadap Perekonomian

Banyak di antara ekonom dan analis pasar yang memperkirakan inflasi akan meningkat hingga 6-7% akibat dari kenaikan harga BBM tersebut. Inflasi makin tinggi berarti biaya hidup makin mahal. Hal tersebut menyebabkan risiko terhadap penambahan jumlah orang miskin. Kesenjangan sosial di masyarakat akan makin dalam jika masyarakat yang masuk ke jurang kemiskinan makin banyak. Namun demikian, Sri Mulyani menilai, penambahan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp24,17 triliun akan mampu meminimalisasi dampak lonjakan harga BBM. Pemerintah akan memantau dampak dari kenaikan harga 3 jenis BBM PT Pertamina (Persero) itu (Kompas.com, 3 September 2022).

Besar kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat tingginya inflasi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketersediaan jaring pengaman sosial. Jika bantuan sosialnya cukup besar cakupannya, tidak hanya untuk

keluarga miskin saja, tetapi juga yang *near-poor*, dampak kenaikan harga BBM terhadap angka kemiskinan akan kecil atau bahkan tidak ada. Dalam mengurangi dampak tersebut, pemerintah baru saja mengumumkan penambahan anggaran bantuan sosial sebesar Rp24,17 triliun. Ini meliputi bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,65 juta keluarga sebesar Rp12,4 triliun. Bantuan subsidi upah sebesar Rp9,6 triliun serta bantuan untuk daerah sebesar Rp2,17 triliun (menpan.go.id, 5 September 2022).

Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (LPEM FEB) Universitas Indonesia Teuku Riefky melihat prospek pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua tahun ini tidak akan setinggi pada Semester I yang mencapai 5,23%. Namun, ekonomi masih berpotensi tumbuh di atas 5% sehingga untuk keseluruhan tahun pertumbuhannya pada rentang 5%-5,1%. Pertumbuhan ekonomi masih robust di atas 5% pada Semester II meski tidak akan sekuat pada paruh pertama, dengan momentum pemulihan yang masih berlanjut meskipun memang pertumbuhannya akan lambat (katadata.co.id, 26 Agustus 2022).

Potensi Kenaikan Inflasi

Banyak studi yang dilakukan telah menghasilkan temuan yang mengindikasikan bahwa inflasi di Indonesia cenderung disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya produksi (*cost push Inflation*), di samping karena tarikan permintaan (*demand pull inflation*). Salah satunya adalah penelitian yang mengamati perubahan nilai tukar, jumlah uang beredar dan harga BBM dalam negeri yang dijadikannya sebagai *leading* indikator yang cukup baik untuk menaksir laju inflasi bulanan. Penelitian ini menemukan bahwa setiap kenaikan

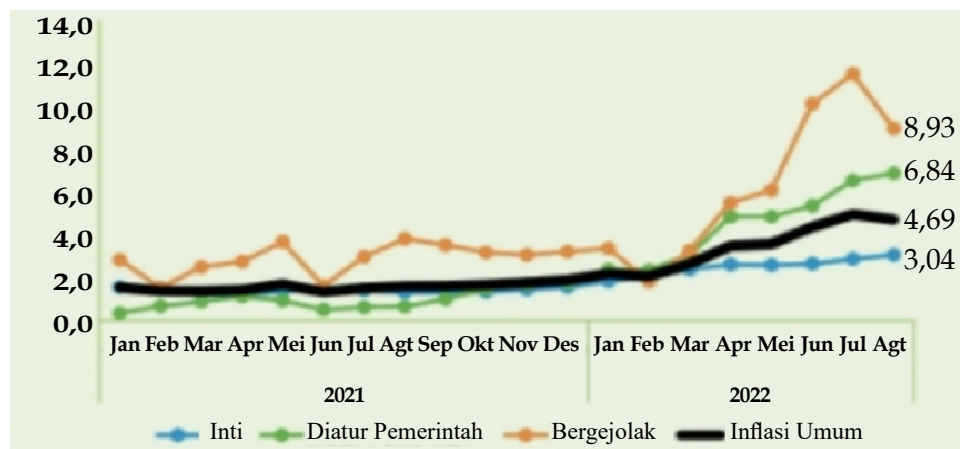
1% harga BBM akan memberikan tambahan inflasi sekitar 0,085% (Harrunurasyid. 2013).

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menghitung, dengan asumsi bahwa harga BBM secara keseluruhan naik 30%, bisa menaikkan inflasi sampai 8% pada tahun ini. Adapun inflasi *headline* pada bulan lalu tercatat sebesar 4,94% secara tahunan merupakan yang tertinggi sejak Oktober 2015. Setiap kenaikan harga BBM 10% akan menambah inflasi satu poin. Jika tahun ini diasumsikan inflasi pada 5-6% tanpa kenaikan harga BBM, maka inflasi diperkirakan mencapai 8% dengan kenaikan harga 30% (katadata.co.id, 29 Agustus 2022).

Efek kenaikan inflasi terhadap daya beli bisa diminimalisasi jika pemerintah menyediakan tambahan bantuan sosial untuk masyarakat rentan. Sementara efek kenaikan suku bunga terhadap perekonomian membutuhkan waktu. Kemungkinan dampaknya baru akan terasa enam hingga sembilan bulan ke depan. Oleh karena itu, efek pengetatan moneter masih sangat minimal pada kinerja ekonomi akhir tahun. Perbankan juga tidak akan langsung menaikkan bunga

pinjamannya sekalipun bunga acuan bank sentral naik. Beberapa bank kemungkinan tidak akan menaikkan bunga pinjaman demi mengejar volume kredit (katadata.co.id, 26 Agustus 2022).

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan IHK komponen inti mengalami inflasi tahunan 3,04% (*year on year/yoy*) pada Agustus 2022. Inflasi inti tersebut lebih tinggi dibanding Juli 2022 yang lajunya 2,86% (yoy). Kemudian IHK komponen harga yang diatur pemerintah meningkat 6,84% (yoy) pada Agustus 2022. Ini juga lebih tinggi dari 6,51% (yoy) pada bulan sebelumnya, kemungkinan akan naik lebih tinggi karena penyesuaian harga BBM. Sementara itu IHK komponen harga yang bergejolak menunjukkan tanda-tanda mereda, seiring dengan perbaikan suplai pangan di tengah kondisi cuaca yang membaik. Laju inflasi tahunannya tercatat 8,93% (yoy) pada Agustus 2022, lebih rendah dari 11,47% (yoy) pada bulan sebelumnya. Secara keseluruhan, tingkat inflasi tahunan umum juga mereda ke 4,69% (yoy) pada Agustus 2022, dibanding 4,94% (yoy) pada bulan sebelumnya (Gambar 1).



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 1. Inflasi Tahunan Menurut Komponen (Agustus 2022)

Kenaikan harga ini kemudian dapat menaikkan angka garis kemiskinan yang dihitung BPS sehingga akan ikut berpengaruh terhadap peningkatan jumlah orang miskin. Pada golongan ekonomi bawah, dampaknya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka menjadi lebih sulit. Inflasi yang naik 8% bagi kalangan menengah atas hanya mengurangi biaya kebutuhan tersiernya saja. Namun, Ekonom Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan menilai kenaikan harga BBM tidak serta merta mendorong angka kemiskinan naik tinggi (katadata.co.id, 29 Agustus 2022).

Kenaikan Suku Bunga Acuan BI dan Mitigasi Kenaikan Harga BBM

Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM jenis pertalite, solar dan pertamax akan mempengaruhi arah kebijakan moneter Bank Indonesia ke depan. Beberapa ekonom melihat BI akan menaikkan bunga lebih besar dibandingkan dalam kondisi tidak ada kenaikan harga BBM. BI mengungkapkan kenaikan suku bunga acuan BI sebagai langkah *pre-emptive* (mendahului) dan *forward looking* (melihat ke depan) untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi akibat kenaikan harga BBM dan inflasi volatile food.

Sebelum adanya kenaikan harga BBM, inflasi inti yang menjadi indikator BI untuk mengubah kebijakan suku bunga, sudah mencapai 2,86% secara tahunan. Dengan risiko inflasi inti dan ekspektasi inflasi meningkat, BI kemudian menaikkan bunga 25 basis points (bps) pada Rapat

Dewan Gubernur (RDG) BI bulan Agustus. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual juga melihat BI akan menaikkan bunga lebih tinggi dari perkiraan awal, menjadi 100-150 bps. BI diperkirakan akan terus menaikkan bunga pada empat RDG terakhirnya hingga Desember. Pada RDG bulan September, suku bunga diprediksi akan kembali naik 25 bps (katadata.co.id, 5 September 2022). Lebih jauh lagi, kenaikan inflasi yang berlanjut ke Semester I tahun 2023 diproyeksikan akan membuka peluang BI untuk melanjutkan kenaikan suku bunga acuan pada awal tahun depan.

Untuk mengendalikan inflasi lebih lanjut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto telah menegaskan agar pemerintah daerah yang inflasinya masih di atas level nasional, harus secara cermat dan berupaya ekstra untuk terus menurunkannya ke dalam rentang maksimal 5% pada bulan-bulan ke depan. Selain itu, terdapat beberapa arahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yaitu melakukan perluasan kerja sama daerah, terutama untuk daerah surplus atau defisit untuk menjaga ketersediaan pasokan komoditas; melakukan operasi pasar dengan melibatkan berbagai *stakeholder*; melakukan pemanfaatan platform perdagangan digital untuk memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok; pemberian subsidi ongkos angkut sebagai dukungan untuk memperlancar distribusi; membuat neraca komoditas pangan strategi untuk 10 komoditas pokok masyarakat di wilayah masing-masing; menggunakan belanja tidak terduga pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing untuk mengendalikan inflasi sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri, yakni dengan mengoptimalkan Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD), antara lain Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tematik ketahanan pangan. Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan gerakan nasional inflasi pangan agar mempercepat stabilisasi harga (cnbcindonesia.com, 5 September 2022).

Penutup

Inflasi diperkirakan akan meningkat hingga 6-7% akibat dari kenaikan harga BBM sepanjang tahun 2022. Sementara efek kenaikan suku bunga acuan BI terhadap perekonomian membutuhkan waktu. Kemungkinan dampaknya baru akan terasa enam hingga sembilan bulan ke depan. Namun, kenaikan suku bunga acuan BI juga merupakan langkah *pre-emptive* dan *forward looking* untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi.

Besar kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat potensi inflasi yang akan dialami ke depannya, dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketersediaan jaring pengaman sosial. Jika bantuan sosialnya cukup besar cakupannya, tidak hanya untuk keluarga miskin saja, tetapi juga yang *near-poor*, dampak kenaikan harga BBM terhadap angka kemiskinan akan kecil atau bahkan tidak ada. Terkait hal ini dukungan dan pengawasan DPR RI khususnya Komisi XI dan Komisi IV juga diperlukan dalam pengendalian inflasi di tengah masyarakat, khususnya sektor pangan yang masih pada level 9%, dan berpotensi

meningkat karena kenaikan harga BBM. Salah satunya dengan menjaga suplai dan distribusi bahan makanan oleh tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.

Referensi

"Harga Peralite, Solar, Pertamina Resmi Naik, Sri Mulyani Pantau Dampaknya ke Inflasi RI", 3 September 2022, <https://money.kompas.com/read/2022/09/03/145857326/harga-pertalite-solar-pertamax-resmi-naik-sri-mulyani-pantau-dampaknya-ke>, diakses 5 September 2022.

Harrunurasyid. 2013. Pengaruh Perubahan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Tingkat Inflasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 11 No. 2 Desember, hal. 78-90.

"Pemerintah Putuskan Pengalihan Subsidi BBM Untuk Bantuan Tepat Sasaran", 5 September 2022, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/pemerintah-putuskan-pengalihan-subsidi-bbm-untuk-bantuan-tepat-sasaran>, diakses 6 September 2022.

"Pukulan Ekonomi Jika Harga BBM Naik di Tengah Kenaikan Bunga BI", 26 Agustus 2022, <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/630866a1aac53/pukulan-ekonomi-jika-harga-bbm-naik-di-tengah-kenaikan-bunga-bi>, diakses 6 September 2022.

"Sebut Kenaikan Harga BBM Lindungi Kelas Ekonomi Rentan, Ini Penjelasan KSP", 4 September 2022, <https://bisnis.tempo.co/read/1630398/sebut-kenaikan-harga-bbm-lindungi-kelas>

ekonomi-rentan-ini-penjelasan-ksp, diakses 7 September 2022.

“Siap-Siap Inflasi dan Kemiskinan Melejit Jika Harga BBM Subsidi Naik”, 29 Agustus 2022, <https://katadata.co.id/happyfajrian/finansial/630c9c82cdbfe/siap-siap-inflasi-dan-kemiskinan-melejit-jika-harga-bbm-subsidi-naik>, diakses 6 September 2022.

“Siap-siap Suku Bunga Acuan Ikut Harga BBM: Nanjak!”, 5 September 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220905071235-4-369204/siap-siap-suku-bunga-acuan-ikut-harga-bbm-nanjak>, diakses 6 September 2022.



Edmira Rivani
edmira.rivani@dpr.go.id

Edmira Rivani, S.Si, M.Stat. menyelesaikan studi S1 pada jurusan Statistika – Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran pada tahun 2008, dan melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana pada Jurusan Statistika Terapan – Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran tahun 2009. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Madya Pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah tentang ekonomi dan kebijakan publik telah dihasilkan seperti: Perubahan Struktur Ekonomi Tenaga Kerja dan Analisis Multidimensional Scaling (MDS) dalam Mengelompokkan Penyerapan Tenaga Kerja di Berbagai Provinsi (2014), Peningkatan Daya Saing Industri Indonesia dalam Menghadapi ASEAN China Free Trade Area (2015), Peran Sektor Pertanian dalam Pembangunan Berkelanjutan (2015).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.